
**JEJARING KERJA SAMA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS DAN DAYA SAING
LULUSAN PENDIDIKAN KEJURUAN**

Oleh:
Suhartanta, Zaenal Arifin
Jurusan Pendidikan Teknik Otomotif
Fakultas Teknik UNY

ABSTRAK

Era globalisasi menuntut tersedianya sumber daya manusia (SDM) yang bermutu dan mempunyai daya saing secara terbuka. Tuntutan tersebut secara simultan telah menjadikan SDM tidak lagi dianggap sebagai pelengkap semata, akan tetapi telah menjadi kekuatan utama bagi industri dalam menghasilkan keunggulan dalam konteks yang lebih komprehensif, inovatif dengan sudut pandang yang holistik. Pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia kerja dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang sesuai dengan keinginan dunia kerja. Pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan kejuruan dituntut mampu menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan pembangunan, mengubah status siswa dari status beban menjadi aset bangsa, menciptakan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan mutu dan daya saing lulusan pendidikan kejuruan tersebut adalah dengan mengembangkan jejaring kerjasama dengan *stakeholder*. Melalui jejaring kerjasama ini akan terjadi penguatan posisi tawar terhadap *stakeholder* dalam mengembangkan pendidikan.

Manfaat langsung yang diperoleh sekolah lewat jejaring kerjasama di antaranya adalah program-program akademik yang diselenggarakan sekolah akan dapat dimantapkan secara substansial. Di samping itu juga akan diperoleh manfaat ekonomis akibat pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada. Setidak-tidaknya penggunaan sumber daya akan lebih efektif daripada bila hanya dimanfaatkan oleh lembaga masing-masing secara individual.

Kata Kunci: SDM era global, Reposisi Pendidikan Kejuruan, Jejaring Kerjasama Sekolah dengan Stakeholder.

PENDAHULUAN

Globalisasi dan industrialisasi merupakan sebuah tantangan dan peluang yang harus dapat dimanfaatkan oleh Bangsa Indonesia untuk dapat hidup sejajar dan berdampingan dengan masyarakat dunia. Globalisasi dan industrialisasi di satu sisi membuka peluang untuk mempercepat laju pembangunan, tetapi di sisi lain membawa tantangan persaingan yang semakin ketat dan tajam. Sebagai dampak era globalisasi menimbulkan makin tajamnya tekanan kompetisi nasional, regional maupun global, dan menuntut industri nasional untuk mampu menghasilkan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) atas produk maupun jasa yang dihasilkannya. Tuntutan tersebut secara simultan telah menjadikan sumber daya manusia (SDM) tidak lagi dianggap sebagai pelengkap semata, akan tetapi telah menjadi kekuatan utama bagi industri dalam menghasilkan keunggulan dalam konteks yang lebih komprehensif, inovatif dengan sudut pandang yang holistik.

Pendidikan yang paling sesuai untuk menghadapi tantangan globalisasi adalah pendidikan yang berorientasi pada dunia industri dengan penekanan pada pendekatan pembelajaran dan didukung oleh kurikulum yang sesuai. Dunia industri yang merupakan sasaran dari proses dan hasil pembelajaran sekolah mempunyai karakter dan nuansa tersendiri. Oleh karena itu sekolah dalam proses pembelajaran harus bisa membuat pendekatan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan keinginan dunia industri.

Untuk menghadapi hal tersebut, pendidikan di Indonesia, terutama pendidikan kejuruan dituntut mampu menyiapkan tenaga kerja terampil untuk mengisi keperluan pembangunan, mengubah status siswa dari status beban menjadi aset bangsa, menciptakan sumberdaya manusia profesional yang dapat diandalkan dan unggul menghadapi persaingan global. Pembangunan di Indonesia telah berjalan dengan pesat di segala sektor, pembangunan tersebut tidak mungkin dapat terlaksana apabila tidak didukung oleh tenaga kerja yang kompeten.

Pendidikan kejuruan merupakan lembaga pendidikan yang menyiapkan peserta didik yang berminat untuk dididik menjadi tenaga kerja bidang tertentu yang sesuai dengan tuntutan dunia kerja. Dengan demikian, terdapat dua variabel yang saling berkaitan yaitu variabel peserta didik dan bidang pekerjaan/dunia kerja. Terdapat dua kemungkinan mengenai hubungan antara peserta didik dengan bidang pekerjaan yaitu: pertama, kompetensi peserta didik yang dihasilkan dari pendidikan kejuruan sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan (*match*); dan ke dua, kompetensi peserta didik tidak sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan (*mismatch*). Pendidikan kejuruan yang efektif adalah pendidikan yang dapat menghasilkan kompetensi lulusan (peserta didik) yang sesuai dengan persyaratan bidang pekerjaan tertentu/dunia kerja (Calhoun and Finch, 1982).

Bagi lembaga pendidikan kejuruan, mengikuti perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan adalah salah satu kunci utama dalam mempersiapkan lulusan yang siap untuk diterjunkan ke dunia pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut lembaga pendidikan kejuruan harus memprioritaskan pengembangan sistem pendidikan yang berorientasi pada peningkatan tamatan yang benar-benar profesional, memiliki etos kerja, disiplin dan tetap menjunjung tinggi serta berakar pada budaya bangsa.

Namun hingga saat ini pendidikan kejuruan masih menghadapi kendala kesepadanan kualitatif dan kuantitatif (Sumarno, 2008). Kesepadanan kualitatif terjadi karena perkembangan teknologi di industri yang sangat cepat sehingga terjadi kesenjangan kompetensi yang dimiliki lulusan pendidikan kejuruan dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri, sementara kesepadanan kuantitatif terjadi karena adanya ketidak seimbangan jumlah lapangan kerja yang ada dengan jumlah output pendidikan yang mencari pekerjaan.

Berdasarkan data pada Biro Pusat Statistik dapat digambarkan bahwa hampir terdapat 20% lowongan kerja yang tidak terisi, separuhnya adalah angkatan kerja berpendidikan sarjana dan ahli madya. Sementara angka pengangguran terbuka pada angkatan kerja berpendidikan menengah masih menunjukkan tren meningkat. Sebagai gambaran pada tahun 2007-2008, peningkatan jumlah pengangguran berpendidikan menengah ke atas SMA/SMK dari 3,6 juta menjadi 3,9 juta atau sebesar $\pm 7\%$, pada pendidikan diploma/akademi dari 237.251 orang menjadi 322.836 orang atau meningkat sebesar 36%, pada pendidikan sarjana dari 348.107 orang menjadi 385.418 orang atau meningkat sebesar 11% (data BPS 2008 diolah). Besarnya pertumbuhan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan sehingga penyelesaiannya harus segera dipikirkan dan ditindak lanjuti dengan segera.

Bertolak dari uraian di atas, pendidikan kejuruan harus segera dapat mereposisi dan memperbaiki kualitasnya terutama memperkuat dasar konsepnya agar dapat berkembang lebih baik. Reposisi ini ditujukan untuk menata ulang sistem pendidikan kejuruan agar menjadi sistem pendidikan yang *permeable dan flexible*, dengan pola pembelajarannya yang berbasis kompetensi. Disamping itu, juga untuk menata ulang bidang atau program keahlian yang lebih menekankan pada kebutuhan pasar. Perubahan paradigma penyelenggaraan pendidikan kejuruan pasca reposisi, misalnya adalah berubahnya orientasi pendidikan kejuruan yang dikembangkan dari yang bersifat *supply driven* menjadi *demand driven*. Sistem pengelolaan yang tadinya bersifat sentralistik, berubah menjadi desentralisasi. Pendekatan pembelajarannya-pun bergeser, dari pendekatan mata pelajaran menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Pola penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan pun berkembang dari yang semula sangat terstruktur, menjadi lebih luwes (*flexible*) dan terbuka (*permeable*).

Berbagai pihak mengatakan bahwa program yang dilaksanakan di pendidikan kejuruan belum sesuai dengan kondisi nyata di dunia kerja, belum mencapai kompetensi yang diharapkan, sehingga banyak menyebabkan terjadinya pengangguran. Ketidaksesuaian (*mismatch*) ini telah menjadi isu utama yang menyebabkan polemik berkepanjangan antara dunia usaha, dunia industri dan dunia pendidikan. Padahal pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam memperbaiki mutu pendidikan kejuruan dengan melakukan penambahan pembangunan fasilitas fisik bangunan, pengadaan peralatan praktik, pengadaan dan penataran guru, dan peningkatan pengembangan kurikulum.

Berangkat dari beberapa permasalahan tersebut maka perlu adanya suatu upaya dari lembaga pendidikan dan dunia usaha untuk dapat bersama-sama mengembangkan pendidikan, agar tujuan dunia usaha dan lembaga pendidikan dapat tercapai dan selaras (Sherry and Girling, 1991). Bentuk kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri dalam mengembangkan dan menyelaraskan tujuan tersebut adalah mengembangkan komunikasi yang berkelanjutan dalam wadah **jejaring kerjasama**, sehingga kebutuhan kompetensi industri dapat diselaraskan dengan program pendidikan di sekolah. Dengan demikian lulusan memperoleh bekal yang cukup dan memadai untuk dapat bersaing pada dunia kerja, di samping dunia usaha mendapatkan tenaga kerja sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan.

ANALISIS PEMECAHAN MASALAH

Sejalan dengan kebutuhan untuk mendapatkan SDM yang berkualitas maka pemerintah melalui Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk menyiapkan lulusan yang memiliki bekal penunjang bagi penguasaan keahlian profesi dan bekal kemampuan pengembangan diri untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang tertentu. Hal ini tertulis dalam penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional yang berbunyi: "Pendidikan kejuruan adalah merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan siswa terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu". Ditegaskan pula dalam kurikulum SMK (2004: 1) bahwa peran SMK adalah menyiapkan siswa dengan kemampuan dan keterampilan bidang tertentu agar setelah lulus dapat bekerja pada bidang tertentu baik secara mandiri (wiraswasta) maupun untuk mengisi lowongan yang ada. Dilihat dari tujuan, program pendidikan SMK akan memberikan program pelayanan proses pembelajaran dan juga pelayanan pemasaran kepada lulusannya.

Meskipun pendidikan kejuruan tidak terpisahkan dari sistem pendidikan secara keseluruhan, namun sudah barang tentu mempunyai kekhususan atau karakteristik tertentu yang membedakannya dengan pendidikan yang lain. Perbedaan ini tidak hanya dalam definisi, struktur organisasi dan tujuan pendidikannya saja, tetapi juga tercermin dalam aspek-aspek lain yang erat kaitannya dengan perencanaan kurikulum, yaitu : (1) orientasi pendidikannya, (2) justifikasi untuk eksistensinya, (3) fokus kurikulumnya, (4) kriteria keberhasilannya, (5) kepekaannya terhadap perkembangan masyarakat, (6) perbekalan logistiknya, dan (7) hubungannya dengan masyarakat dunia usaha (Finch, 1979). Hubungan lebih jauh dengan masyarakat mencakup daya dukung dan daya serap lingkungan yang sangat penting perannya bagi hidup dan matinya suatu sekolah kejuruan.

Program pendidikan kejuruan harus disusun dan diorganisir guna menyiapkan individu dapat bekerja dengan memberikan seperangkat kompetensi dasar baik keterampilan dalam berfikir dan keterampilan fisik yang spesifik agar dapat memberikan kontribusi secara ekonomi baik kepada dirinya, dan masyarakat (Perkins, 1998). Dari penjelasan Perkins tersebut nampak bahwa pendidikan kejuruan memiliki misi utama dalam membentuk fondasi yang kuat bagi siswa dalam proses belajar mengajar, penguasaan dan keterampilan akademis. Hal tersebut senada dengan pendapat Walter (1993) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus diarahkan pada program pendidikan yang mengarah dalam mempersiapkan individu sebagai seorang pekerja.

Seperti telah dibahas pendidikan berperan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang sangat diperlukan untuk memajukan bangsa, dan pembangunan pendidikan saat ini secara jujur belum mampu menghasilkan SDM seperti yang diharapkan. Permasalahan ini kemungkinan ada dua faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Pertama strategi pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat *input oriented*. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan *output* (keluaran) yang bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi *input-output* tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah), strategi tersebut mungkin dapat diterapkan dengan hasil yang baik dalam institusi ekonomi dan industri.

Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifat *macro-oriented*, diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya, banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro (pusat) tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah). Atau dengan singkat dapat dikatakan bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan, sering sekali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.

Diskusi tersebut memberikan pemahaman bahwa pembangunan pendidikan bukan hanya terfokus pada penyediaan faktor input pendidikan, tetapi juga harus lebih memperhatikan faktor proses pendidikan. Input pendidikan merupakan hal yang mutlak harus ada, namun dalam batas - batas tertentu tidak menjadi jaminan dapat secara otomatis meningkatkan mutu pendidikan. Di samping itu mengingat sekolah sebagai unit pelaksana pendidikan formal terdepan dengan berbagai keragaman potensi anak didik yang memerlukan layanan pendidikan yang beragam. Kondisi lingkungan yang berbeda satu dengan lainnya, maka sekolah harus dinamis dan kreatif dalam melaksanakan perannya untuk mengupayakan peningkatan kualitas/mutu pendidikan. Hal ini akan dapat dilaksanakan, jika sekolah dengan berbagai keragamannya itu, diberikan kepercayaan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta membangun adanya jejaring kerjasama dengan *stakeholder*.

Salah satu yang selalu diharapkan oleh segenap Bangsa Indonesia terhadap pendidikan kita adalah terwujudnya sistem pendidikan yang ideal. Manakala pendidikan telah ideal, maka Bangsa Indonesia akan memperoleh pembinaan dengan baik sehingga akan dihasilkan manusia Indonesia yang baik. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi sekolah untuk menjalin kerjasama yang baik melalui sebuah jejaring kerjasama pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan daya saing lembaga pendidikan adalah pengembangan jejaring kerjasama. Melalui jejaring kerjasama ini akan terjadi penguatan posisi tawar terhadap *stakeholder* dalam mengembangkan pendidikan.

Mengingat betapa pentingnya jejaring kerjasama pada suatu sekolah, maka hal ini perlu mendapat perhatian sekolah dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing lulusan. Secara garis besar jejaring kerjasama tersebut dapat dibagi dalam 2 (dua) kategori, jaringan kerjasama internal dan eksternal. Jejaring kerjasama internal diarahkan untuk mewujudkan kerjasama sinergis antara elemen-elemen yang ada dalam lingkup sekolah yang membentuk sebuah entitas baru. Jaringan kerjasama eksternal diarahkan untuk mewujudkan kerjasama sinergis antara jaringan sekolah dengan pihak luar yang terlibat (Pemda, tokoh masyarakat, industri swasta, BUMN, dan masyarakat setempat). Dalam mewujudkan dan mengembangkan jejaring kerjasama internal dan eksternal dilakukan beberapa kegiatan antara lain : pertemuan teknis, rapat koordinasi, pertemuan konsultatif, workshop, dan lain-lain.

Peningkatan jalinan kerja sama dengan lembaga lain baik swasta atau negeri, baik berskala lokal, regional maupun internasional merupakan suatu keharusan. Salah satu kelemahan lembaga pendidikan secara umum pada saat ini adalah kurangnya keberanian dalam melakukan terobosan-terobosan dalam membentuk jejaring kerja sama. Padahal banyak manfaat yang dapat diambil dengan adanya kerja sama tersebut. Dalam rangka membentuk kualitas sumber daya manusia yang unggul di era global, kerjasama antar lembaga menjadi sesuatu yang tidak dapat dinafikan, dan harus digarap secara intens, serius oleh satu lembaga tersendiri.

Beberapa bentuk kerjasama yang dilakukan oleh sekolah dengan *stakeholder* dalam meningkatkan pertukaran informasi, khususnya dalam hal tukar menukar informasi perkembangan teknologi yang terkait dengan kualifikasi dan kompetensi tenaga kerja yang dibutuhkan oleh industri untuk mendukung kegiatan bisnisnya. Teknologi dan Jaringan Informasi, harus dapat dioptimalkan sejauh mungkin agar informasi dapat bermanfaat bagi yang memerlukannya khususnya dalam pengembangan pendidikan di lembaga pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan.

Untuk memahami secara lebih teknis bagaimana membangun jejaring kerjasama (*networking*), Maksam (2008) memaparkan bahwa antara *stakeholder* dan penyedia informasi harus ada timbal balik dan proses komunikasi yang baik untuk menghasilkan dan menyediakan suatu informasi. Dalam hal ini, jejaring (*networking*) kerjasama harus dapat menjadi jembatan yang mampu menghimpun seluruh informasi terkait baik bersumber dari internal maupun dari luar instansinya. Seperti yang dinyatakan Maksam (2008), diperlukan jejaring/kerjasama pemanfaatan bersama sumberdaya informasi (*sharing*) antar lembaga atau entitas yang dikoordinasikan melalui sebuah sarana komunikasi baik berupa teknologi IT maupun lainnya. Oleh sebab itu, Maksam mengemukakan strategi yang harus dilakukan adalah menyediakan sumber daya, infrastruktur dan anggaran yang memadai.

Setidaknya terdapat dua manfaat langsung yang diperoleh sekolah lewat kerjasama. Pertama, melalui kerjasama program-program akademik yang diselenggarakan akan dapat dimantapkan secara substansial dengan mengembangkan bidang-bidang pendidikan dan lain sebagainya. Dengan istilah yang lebih sederhana, sekolah dapat melakukan pembaharuan materi dan metode pembelajarannya. Kedua, melalui kerjasama akan diperoleh manfaat ekonomis akibat pemanfaatan bersama berbagai sumber daya dan fasilitas yang ada. Setidak-tidaknya penggunaan sumber daya akan lebih efektif daripada bila hanya dimanfaatkan oleh lembaga masing-masing secara individual. Semua manfaat itu pada akhirnya akan menunjang upaya yang dilakukan untuk memperbaiki pengembangan lembaga pendidikan.

Keberhasilan pengembangan bisnis di beberapa negara maju diantaranya karena jaringan usahanya (*business networks*) berkembang dengan baik. Sebagai contoh di Taiwan misalnya, ada dua konsep yang dikembangkan, yaitu: (1) untuk sektor industri dikenal dengan "*satellite factory system*"; dan (2) untuk sektor non industri jaringan usaha yang dikembangkan disebut "*cooperative exchange program*". Konsep *satellite factory system* identik dengan pola sub kontrak sebagaimana berkembang pada industri otomotif di Jepang (Dean, 1997). Industri-industri besar melakukan sub kontrak beberapa komponen yang dikerjakan oleh industri kecil dan menengah. Dalam kaitan ini, industri besar hanya memproduksi bagian-bagian penting dan merakit produk yang dihasilkan. Di

Taiwan, industri-industri yang mengembangkan sistem satelit antara lain industri perakitan mobil, industri elektronik (ACER, SONY, Motorola, dan lain-lain), dan industri mesin pesawat (*Thunder Tiger*).

Konsep *cooperative exchange program*, merupakan forum kerjasama informasi dan pengalaman dalam pengembangan usaha. Jaringan usaha seperti ini dilakukan secara multi sektoral. Di Australia, Dean (1997) mengungkapkan pengalaman pengembangan jaringan usaha yang dirintis melalui proyek *program network* antara tahun 1991 dan 1993. Pilot proyek jaringan usaha di Australia dilaksanakan oleh "*the National Industry Extension Service (NIES)*" yaitu suatu *joint venture* antara pemerintah *commonwealth* dengan delapan negara bagian teritori. Dari pilot proyek tersebut, menurut Dean dapat diklasifikasikan dua konsepsi jaringan usaha yang berkembang, yaitu "*hard*" dan "*soft networks*". *Hard Networks* merupakan jaringan usaha yang betul-betul terjadi secara *solid* dalam mengembangkan usaha. Sedangkan *soft networks* lebih ke arah jaringan usaha informal yang pada dasarnya untuk saling tukar-menukar informasi. Lebih jauh Dean mengungkapkan bahwa jaringan usaha hendaknya jangan dipaksakan, tetapi pemerintah tetap memberikan arahan dan para pelaku bisnis diberikan kesempatan untuk melakukan kerjasama usaha atas prakarsanya sendiri.

Selain konsepsi jaringan usaha tersebut di atas, Hatch (2000) mengemukakan beberapa konsep jaringan usaha. Secara umum terdapat empat type jaringan yang berbeda, antara lain : (1) jaringan yang berkonfigurasi kembali agar rantai perusahaan bermakna, untuk membuat scope bisnis yang ekonomis; (2) jaringan yang meningkatkan efisiensi internal; (3) jaringan untuk mengembangkan pengelolaan yang ekonomis; dan (4) jaringan untuk meningkatkan posisi tawar.

Apa yang dapat dipetik dari pengalaman negara-negara maju dalam mengembangkan jaringan kerjasama bisnis dapat pula dianalogikan bahkan diimplementasikan dalam dunia pendidikan. Sebagai langkah awal yang perlu dilakukan adalah merubah kultur dan iklim pendidikan (*changing climate and culture*). Inilah yang tidak mudah dilakukan yaitu merubah budaya dan iklim pendidikan menjadi lebih kondusif. Guna lebih mempercepat proses terjadinya jejaring kerjasama antara lembaga pendidikan dan dunia industri atau dengan sesama lembaga pendidikan, baik di dalam dan di luar negeri maka perlu ada media khusus untuk mengkampanyekan hal tersebut.

Strategi dasar membangun jejaring kerjasama (*cooperation networking*) seperti telah diuraikan di atas, jejaring kerjasama sangat penting untuk memberikan "wadah" kegiatan peningkatan kualitas dan daya saing lulusan. Di samping itu jejaring kerjasama eksternal secara esensial sebenarnya bisa menjadi sumber informasi alternatif bagi lembaga. Seperti kita ketahui masalah krusial yang sangat penting dihadapi manajemen pendidikan, khususnya pada pendidikan kejuruan adalah aspek keberlanjutan (*sustainability*), lebih khusus lagi pada sekolah swasta adalah masalah finansial. Ketergantungan pada pemasukan dana dari siswa sangat tidak strategis untuk keperluan pengembangan dan keberlanjutan lembaga. Langkah yang paling strategis untuk mengatasi hal ini adalah dengan meningkatkan *networking*.

Selanjutnya Maksam (2008) menyatakan bahwa jaringan informasi dapat dipandang sebagai unit pengolah informasi dengan seluruh mata rantai pasokannya, sama halnya dengan jaringan material dengan logistik dan jaringan mata rantainya yang kegiatan utamanya adalah pertukaran material. Kegiatan yang sangat mendasar dari dinamika yang membentuk jejaring informasi adalah "transaksi informasi" yang terkait dengan pertukaran informasi (dapat berupa berita, aplikasi piranti lunak, data tentang sesuatu hal, dsb) antara dua atau lebih organisasi/lembaga/institusi. Informasi ditransaksikan melalui pengiriman "salinan" (*copy*) dari informasi melalui berbagai media sebagai pembawa informasi (*carrier*) misalnya mesin fotokopi, faximile, telepon, email, website, dan lain-lain. Jaringan informasi pada intinya adalah kegiatan yang berkaitan dengan pertukaran informasi antar kelompok yang mempunyai interes atau kepentingan yang sama, misalnya kelompok pengusaha, kalangan pendidikan, lembaga penelitian atau masyarakat.

Menurut Lunenburg and Ornstein (2004 : 210), komunikasi yang terjadi dalam dunia pendidikan khususnya sekolah merupakan proses yang menghubungkan individu, kelompok dalam organisasi sekolah, tentunya juga *stakeholder* yang mempunyai kepentingan dengan sekolah baik dunia industri, pemerintah daerah maupun pihak-pihak lainnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam komunikasi semua komponen yang terlibat dalam proses pendidikan memiliki hubungan dan kepentingan yang sama dalam mencapai tujuan pendidikan. Oleh karenanya dalam menjalin komunikasi semua pihak berharap informasi dapat merupakan suatu hal yang sangat berharga dalam pengembangan proses pendidikan. Keakuratan dan jenis informasi akan sangat mempengaruhi proses pendidikan. Seorang administrator atau leader sangat berkepentingan terhadap setiap informasi yang didapat baik yang berasal dari eksternal maupun internal dalam pengembangan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Calhoun, Calfrey C and Finch, Alton V. (1982), *Vocational Education: concepts and operation*. Belmont, Wadsworth Publishing Co.
- Curtis R. Finch and John R. Crunkilton, (1979), *Curriculum Development in Vocational and Technical Education*, Boston, Allyn and Bacon, Inc,
- Dean, John. (1997), *Business Networks and Strategic Alliances in Australia*. Department of Industry, Science and Tourism, Australia.
- Forrester, W.J. (1973), *Industrial Dynamics*, Massachusetts, USA, The MIT Press.
- Gaikindo, (2008), *Automotive Industry Data Newsletter*, Nos. 0102, 0302, 0501, and 0514. Original source: AID/Industry sources.
- Hamidi, (2004), *Pendidikan Kejuruan, Investasi Membangun Manusia Produktif*, Makalah disampaikan dalam HARDIKNAS, Harian KOMPAS 30 April 2002, <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0204/30/dikbud/pend40.htm>.
- Hatch. Richard.C, (2000) *Overcoming the limitations of size: Network Strategies for SME in Asia* (Paper for the ABD/OECD workshop on SME Financing in Asia).
- Maksum. (2008), *Mekanisme Kerjasama Jaringan Informasi*, Makalah Lokakarya INSTANET dan Outreach Services SNI di Jakarta tanggal 21 Agustus 2008
- Muchlas Samani. (1998). *Pendidikan Kejuruan Menyongsong Millenium III*, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam bidang Pendidikan Teknologi dan Kejuruan pada Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Pendidikan Teknik Kejuruan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Surabaya pada hari Senin, 14 Desember 1998.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 1998. (1998). Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999. (1999). Pendidikan Tinggi.
- Perkin, D.C, (1988), *The Carl D Perkins Vocational and Technical Education Act*, Public Law 105 – 332. US. Department of Education. Diambil dari <http://www.ed.gov/offices/OVAE/CTE/perkins.html>.03-08
- Sannai, Anata. (2008). Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Tersedia: <http://duniatik.blogspot.com/2008/02/pengertian-teknologi-informasi-dan.html> [23 Maret 2009]
- Sherry, Keith and Girling, (1991), *Education, Management and Participation : New Direction in Educational Administration*, Boston, Allyn and Bacon,
- Sullivan R, McIntosh N, (1995), *The Competency-based Approach to Training*, Maryland JHPIEGO, diambil dari situs <http://www.ponline.org/docs/116859.03-08>
- Sumarno, (2008), *Employability Skills dan Pengaruhnya Terhadap Penghasilan Lulusan SMK Teknologi dan Industri*, Jurnal Kependidikan Lembaga Penelitian UNY, Tahun XXXVIII, Nomor 1, Mei 2008, LLPM UNY, Yogyakarta
- Sutisna (2002). *Perilaku Konsumen & Komunikasi Pemasaran*. Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutisna, Oteng (1983), *Administrasi Pendidikan: Dasar Teoritis untuk Praktek Profesional*. Bandung: Angkasa.
- Sutisna, Oteng (1989) *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: Depdikbud.
- Tilaar, H.A.R, (1998). *Manajemen Pendidikan Nasional*. Bandung: Rosda Karya.
- _____, (2001). *Membenahi Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineke Cipta.
- _____, (2000). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*. Jakarta: Rineke Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan